



Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Tilango

Fahria Rahmamilawaty Abas¹, Zuchri Abdussamad², Yanti Aneta³
S1 Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo¹
S1 Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo²
S1 Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo³

Email: fahriaabas29@gmail.com

Abstract

This study aims to (1) determine the implementation of policies in poverty alleviation through the family of hope program in Tilango District. (2) To find out the constraint factors in the implementation of poverty reduction policies through the family of hope program in Tilango District. The approach used is quantitative with the type of descriptive research. Collecting data using interviews, observation and documentation. Data analysis used the Miles and Huberman model.

The results of this study indicate that (1) The implementation of poverty reduction policies through the Family Hope Program (PKH) in Tilango District, Gorontalo Regency has been carried out in accordance with regulations on the components of health, education and social welfare where the implementation process includes the process of collecting data or selecting beneficiaries of the Family Hope Program (PKH), namely the selection in recruiting PKH participants or PKH beneficiaries is carried out by the central government with various available data, then assistants at the sub-district to village levels verify this, updating the data on the community beneficiaries of the Family Hope Program (PKH) which is carried out every year. 3 months which is intended to obtain more updated data in the field, verification of commitment to the beneficiaries of the Family Hope Program (PKH) carried out at schools or health centers as well as guidance and distribution of assistance to PKH participants. (2) The factors that determine the Family Hope Program in Tilango District, Gorontalo Regency can be improved through supporting factors, namely the existence of communication and coordination as well as cooperation by assistants in Tilango District and by optimizing the value of the benefits of existing knowledge and skills. In addition, success can also be done by reducing existing obstacles, including cooperation between facilitators and local governments, especially village governments, graduation commitments from KPM PKH and then by increasing work commitments from facilitators.

Keywords: PKH, Poverty, Tilango. District

Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan di Kecamatan Tilango. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor kendala dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan di Kecamatan Tilango. Pendekatan yang digunakan yakni kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan pada komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dimana proses implementasinya meliputi proses pendataan atau seleksi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yakni seleksi dalam merekrut peserta PKH atau penerima manfaat PKH dilakukan oleh pemerintah pusat dengan berbagai data yang tersedia yang kemudian pendamping pada tingkat Kecamatan hingga desa melakukan verifikasi atas hal tersebut, pemutakhiran data masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan setiap 3 bulan yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih update di lapangan, verifikasi komitmen pada masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan pada pada sekolah atau puskesmas serta pembinaan dan penyaluran bantuan peserta PKH. (2) Faktor yang menentukan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo dapat ditingkatkan melalui faktor pendukung yakni adanya komunikasi dan koordinasi serta kerja sama oleh pada pendamping di Kecamatan Tilango serta dengan mengoptimalkan nilai manfaat dari pengetahuan dan keterampilan yang ada. Selain itu keberhasilan juga dapat dilakukan dengan mereduksi hambatan yang ada diantaranya kerja sama antar pendamping dengan pemerintah daerah khususnya pemerintah desa, komitmen graduasi dari KPM PKH kemudian dengan meningkatkan komitmen kerja dari pendamping.

Kata Kunci: PKH, Kemiskinan, Kecamatan Tilango

Pendahuluan

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia, hal tersebut sesuai amanat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 dimana menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan di Indonesia, pemerintah melalui kementerian sosial menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju meski jumlahnya tidak besar. Kemiskinan menjadi masalah yang sangat rumit sehingga suatu negara tidak dapat memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan secara sendirian.

Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus-menerus (Suharto, 2009: 131). Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita saat ini, tetapi karena ini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Kompleksitas persoalan kemiskinan membutuhkan upaya penanggulangan yang utuh dan menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu dan terorganisir secara baik. Banyak pendapat dan asumsi yang lebih mirip

mengatakan bahwa kemiskinan itu dipicu oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Namun jika ditelusuri lebih jauh, ada faktor-faktor lain yang mengakibatkan program-program pengentasan kemiskinan. Faktor-faktor itu dapat dilihat dari aspek manajemen program yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pemerintah melalui kementerian sosial menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintahan di bidang sosial PKH merupakan program diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi. Tujuan umum PKH adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

Kabupaten Gorontalo terdapat 19 kecamatan di antaranya Kecamatan Tilango. Pada tahun 2012 Program Keluarga Harapan sudah masuk di Kabupaten Gorontalo. Salah satunya Kecamatan Tilango termasuk dari program keluarga harapan ini dan menjadi sasaran peneliti. Kecamatan Tilango terbagi menjadi 8 Desa namun dari ke 8 Desa tersebut ada beberapa Desa yang tiap tahunnya mengalami peningkatan dalam penerima Program Keluarga Harapan hal ini dibuktikan dengan data-data hasil observasi awal peneliti.

Berdasarkan observasi awal permasalahan tentang penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan dapat dilihat dari segi komponen kesehatan KPM. PKH diwajibkan memeriksa kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 sampai dengan 6. berbanding terbalik dengan yang terjadi di lapangan, rendahnya kondisi kesehatan keluarga sangat miskin berdampak pada tidak optimalnya proses tumbuh kembang anak, terutama pada usia 0-5 tahun, pada tahun 2018-2020 terdapat kecenderungan bertambahnya kasus gizi kurang yang meningkat dari 14 anak pada tahun 2018 menjadi 20 anak pada tahun 2020.

Di satu sisi komponen pendidikan KPM PKH diwajibkan menyelesaikan pendidikan dari usia 6 sampai 21 tahun (SD, SMP, SMA) dan wajib menerima bantuan seperti beasiswa, namun di lapangan masih kurang petugas unit pelaksana Program Keluarga Harapan yang memberikan pelayanan secara langsung kepada penerima bantuan PKH, sehingga tidak semua penerima bantuan dalam PKH dapat memperoleh layanan yang baik, contoh masih belum optimalnya kursus atau belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun. PKH bidang pendidikan memberikan peluang yang lebih baik kepada anak-anak dalam mengakses layanan pendidikan. Salah satu tujuan akhir PKH adalah meningkatkan angka prestasi sekolah bagi anak-anak, khususnya SD, SMP, SMA, serta mengurangi pekerja dibawah umur di Indonesia.

c. komponen Kesejahteraan Sosial (Kessos) KPM PKH diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan lanjut usia seperti Poswindu. Dari setiap komponen diatas dalam menentukan bahwa dia layak mendapatkan bantuan PKH ini dari setiap indikator

masing-masing dilihat dari bukti dan fakta kondisi terkini sebagaimana pada ayat (1) Permensos No 1 Tahun 2018 dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi dari calon penerima manfaat PKH atau sumber lain yang dapat dipercaya dengan dukungan dokumen sah.

Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta kerangka konseptual yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tempat atau lokasi dalam penelitian ini adalah pada Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo.

Waktu penelitian yang dibutuhkan peneliti dalam menyusun Proposal ini, adalah dimulai dari proses penyusunan Proposal Penelitian sampai dengan ujian. Waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 bulan sejak pengumpulan data. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Jenis penelitian bertujuan untuk menentukan bagaimana cara melakukan penelitian dan apa hasil yang akan dicapai dari penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian inibermaksud menggambarkan realitas objek yang diteliti.

Jenis penelitian ini yang digunakan peneliti berdasarkan manfaatnya adalah penelitian murni. Penelitian murni menjadi sumber gagasan dan pemikiran serta mendukung teori menjelaskan bagaimana terjadinya suatu peristiwa. Penelitian ini dilakukan dalam kerangka akademis dan lebih ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan peneliti.

Berdasarkan dimensi waktu, tipe yang digunakan adalah penelitian *cross sectional studies* karena penelitian ini di rancang untuk mempelajari beberapa fenomena yang dilakukan hanya pada suatu waktu, meskipun dalam penelitian ini wawancara dan

informasi memerlukan waktu sampai berbulan-bulan.

Prosedur Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, Suatu penelitian diskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Dengan penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberi gambaran yang sejelas-jelasnya tentang Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo.

Kehadiran peneliti selain sebagai pengumpul data juga bertindak sebagai instrument penelitian. Peneliti sebagai kunci dari penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan. Tapi sebelum melakukan pengambilan data peneliti telah mengutarakan maksud kedatangan peneliti yang didahului dengan surat penelitian yang dikeluarkan dari pimpinan Fakultas Ekonomi UNG, setelah itu peneliti datang ke lapangan dan mencari informasi yang diperlukan seperti menemui key informan. Peneliti kemudian melakukan pendekatan lebih dekat terhadap informan lain dan situs penelitian untuk pengambilan data selanjutnya.

Data dan Sumber Data

Data yang dijadikan sarana analisa bersumber pada data-data yang ada di tempat atau lokasi penelitian. Data yang dimaksud berupa history Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara

Mendalam (interview), Dokumentasi.

Tekhnik Analisis Data dalam Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji secara mendalam dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo.

Hasil Penelitian

Pada Tahun 2007 Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH), tujuan utama PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat sangat miskin. PKH bukan kelanjutan dari Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang merupakan salah satu “crash program” untuk mengatasi dampak akibat kebijakan kenaikan harga BBM yangdi rancang hanya untuk satu tahun. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang dirancang untuk membantu keluarga miskin pada sisi beban pengeluaran, khususnya terkait dengan upaya peningkatan SDM untuk jangka pendek. PKH memperbaiki pola pikir serta merubah perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ke depan, dengan harapan dapat memutus mata rantai kemiskinan untuk jangka panjang (antar generasi). PKH prinsip dasarnya merupakan program yang memberikan bantuan kepada Keluarga Miskin sepanjang penerima mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan Pedoman Operasional Kelembagaan PKH 2011.

Penjelasan mengenai implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo dijabarkan berikut ini:

Komponen kesehatan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH menjadi salah satu program yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dimana lansia diperhatikan tingkat kesehatannya sehingga komponen kesehatan ini harus aktif datang ke puskesmas sebagai afiliasi program PKH komponen kesehatan.

Komponen pendidikan

Mengenai komponen pendidikan dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Gorontalo, Pernyataan dari seluruh informan dapat diinterpretasikan bahwa komponen pendidikan menjadi program yang sangat bermanfaat untuk generasi penerus bangsa dan sangat berguna dalam peningkatan IPM dimana pada aspek ini tingkat pembangunan sumber daya manusia akan sangat memberikan kontribusi dalam berbagai lini kehidupan. Pada syarat memperoleh komponen PKH pendidikan ini yakni anak keluarga kurang mampu yang bersekolah mulai dari Paud hingga SMA/ sederajat. Manfaat sosial bagi para penerima manfaat pendidikan demi kesejahteraan yakni dapat dilihat dari aspek jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek memberikan income effect kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga sangat miskin. Kemudian Untuk jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui: Peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan (price effect anak keluarga sangat miskin). Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (insurance effect). Selain itu, program ini dapat merubah perilaku keluarga sangat miskin untuk memberikan perhatian

yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya.

Komponen Kesejahteraan Sosial

Mengenai komponen kesejahteraan sosial dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Gorontalo, Pernyataan dari seluruh informan dapat diinterpretasikan bahwa program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan dan kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya. Implementasi PKH untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relative kurang peningkatan kesejahteraan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi

Faktor Komunikasi

Pernyataan dari seluruh informan dapat diinterpretasikan bahwa adanya komunikasi dan koordinasi yang baik maka semua pihak yang terlibat dalam suatu kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) akan berjalan dengan baik. Apabila komunikasi dan koordinadi berjalan dengan baik maka akan menjadi pendukung namun jika kurang maksimal maka akan menjadi penghalang atau hambatan. Hal ini karena implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggungjawab terhadap

implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. Hal ini karena arus informasi dan komunikasi perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi pemahaman yang berbeda antara isi kebijakan yang diberikan oleh pusat dengan persepsi aparat pelaksana di daerah. Diperlukan pula dukungan sumber daya maupun stakeholders yang terkait dengan proses implementasi kebijakan dalam pelaksanaan program PKH agar kemiskinan bisa mengalami penurunan.

Faktor Sumber Daya

Pernyataan dari seluruh informan dapat diinterpretasikan bahwa pengetahuan dan keterampilan menjadi suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang lain. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Kemudian ketersediaan dana yang digunakan dalam berbagai kegiatan PKH sangatlah penting agar kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan tujuan dari perumusan sebuah program atau kebijakan.

Faktor Disposisi (Sikap Pelaksana)

Pernyataan dari seluruh informan dapat diinterpretasikan bahwa dalam melaksanakan tugas

dan tanggung jawab sebagai pekerja sosial pada pendamping ataupun koordinator harus bersikap dengan baik kepada masyarakat diantaranya dengan bersikap empati dan responsif dengan berbagai keluhan dan memberikan informasi secara menyeluruh berkaitan dengan implementasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kemudian komitmen sumber daya atau pendamping harus dilaksanakan dengan baik. Sumber daya manusia dalam kegiatan PKH sangatlah penting karena pendamping haruslah melakukan koordinasi dan verifikasi dari pihak ketiga tersebut. Hal ini karena suatu kebijakan publik tentu melibatkan masyarakat publik dan juga stakeholder yang saling berkaitan dan berkesinambungan fungsi dan tugasnya. Setiap pelaksanaan yang dilakukan baik itu validasi penyaluran dan verifikasi yang dilakukan oleh pendamping di laksanakan selesai tepat waktu sesuai jadwal yang berikan oleh pusat, dan tugas untuk pendamping ia yang akan turun langsung kelapangan untuk melakukan validasi, mendampingi peserta pada saat penyaluran dan memastikan bahwa tidak ada peserta yang tidak menerima bantuan pada saat penyaluran, hingga pada verifikasi, pendamping akan melakukan pengecekan ke setiap mitra kerja seperti balai kesehatan atau puskesmas, ke sekolah-sekolah untuk memastikan bantuan tersebut sudah di gunakan sesuai komponen kebutuhan mereka. Sehingga dukungan SDM yang dimaksudkan dalam hal ini untuk melakukan kerja sama antar semua komponen yang terlibat dalam keberhasilan program keluarga harapan (PKH) ini.

Pembahasan

Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan hasil wawancara yang kemudian dikolaborasikan dengan observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan pada komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dimana proses implementasinya meliputi proses pendataan atau seleksi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yakni seleksi dalam merekrut peserta PKH atau penerima manfaat PKH dilakukan oleh pemerintah pusat dengan berbagai data yang tersedia yang kemudian pendamping pada tingkat Kecamatan hingga desa melakukan verifikasi atas hal tersebut, pemutakhiran data masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan setiap 3 bulan yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih update di lapangan, verifikasi komitmen pada masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan pada pada sekolah atau puskesmas serta pembinaan dan penyaluran bantuan peserta PKH

Dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo terdapat beberapa tahap yakni Proses pendataan atau seleksi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Pemutakhiran data masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Verifikasi komitmen pada masyarakat penerima manfaat Program Keluarga

Harapan (PKH), Pembinaan kepada masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Penyaluran dana kepada penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH)

Berdasarkan hasil wawancara yang kemudian dikolaborasikan dengan observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa faktor yang menentukan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo dapat ditingkatkan melalui faktor pendukung yakni adanya komunikasi dan koordinasi serta kerja sama oleh pada pendamping di Kecamatan Tilango serta dengan mengoptimalkan nilai manfaat dari pengetahuan dan keterampilan yang ada. Selain itu keberhasilan juga dapat dilakukan dengan mereduksi hambatan yang ada diantaranya kerja sama antar pendamping dengan pemerintah daerah khususnya pemerintah desa, komitmen graduasi dari KPM PKH kemudian dengan meningkatkan komitmen kerja dari pendamping.

Penutup

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo telah

dilaksanakan sesuai dengan peraturan pada komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dimana proses implementasinya meliputi proses pendataan atau seleksi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yakni seleksi dalam merekrut peserta PKH atau penerima manfaat PKH dilakukan oleh pemerintah pusat dengan berbagai data yang tersedia yang kemudian pendamping pada tingkat Kecamatan hingga desa melakukan verifikasi atas hal tersebut, pemutakhiran data masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan setiap 3 bulan yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih update di lapangan, verifikasi komitmen pada masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan pada pada sekolah atau puskesmas serta pembinaan dan penyaluran bantuan peserta PKH

Faktor yang menentukan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo dapat ditingkatkan melalui faktor pendukung yakni adanya komunikasi dan koordinasi serta kerja sama oleh pada pendamping di Kecamatan Tilango serta dengan mengoptimalkan nilai manfaat dari pengetahuan dan keterampilan yang ada. Selain itu keberhasilan juga dapat dilakukan dengan mereduksi hambatan yang ada diantaranya kerja sama antar pendamping dengan pemerintah daerah khususnya pemerintah desa, komitmen graduasi dari KPM PKH

kemudian dengan meningkatkan komitmen kerja dari pendamping.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah Perlu adanya penyampaian dan kontrol dari pendamping untuk peningkatan kemampuan keluarga dari segi pendidikan dan dari segi ekonomi. Pengelolaan keuangan keluarga, tabungan dan kredit, usaha mikro kecil menengah, kewirausahaan, dan pemasaran agar KPM dapat meningkatkan perekonomian dalam keluarga.

Koordinator dan tim pendamping PKH agar dalam melaksanakan proses pendampingan dilakukan dengan lebih maksimal lagi seperti lebih sering lagi mengadakan sosialisasi mengenai PKH lebih rutin lagi dari sebelumnya, kemudian lebih maksimal lagi dalam melaksanakan proses pencairan dana selanjutnya agar sesuai dengan ketentuan waktu pencairan dana PKH.

Sebaiknya koordinator, operator dan tim pendamping terus berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan pemerintah setempat. Dengan adanya kerja sama ini maka data penerima benar-benar telah tepat sasaran yang dampaknya tidak adanya protes bahkan adanya kesadaran dari masyarakat untuk keluar jika sudah merasa mampu.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijaksanaan dari Abilawa, M.Sabeth., & siddiq, Rohman. 2016. Determinasi Permintaan Uang di Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi
- Afan, Gaffar. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- AG Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- AG. Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arbieyanti Nasution, Desry. 2016. Hubungan Pemahaman Isi, Struktur, dan Ciri Kebahasaan dengan Kemampuan Menulis Teks Eksplanasi oleh Siswa Kelas XI SMA Negeri 5 Medan Tahun Pembelajaran 2015/2016. Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan
- Arif Rohman. 2009. Memahami Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: Laks Bang Mediatama Yogyakarta
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter , 1975, Model-model dalam Kebijakan Implementasi, Yogyakarta
- CORYANATA, ISMA. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar 28-28 Juli 2007
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Dunn, William. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Jogjakarta. Gajah Mada University Press. 2003.
- Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Edi Suharto. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama.
- Formulasi dan Implementasi (1999) Jakarta: Form dan Form
- Penelitian Sosial. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Kadji, Yulianto. 2008. Implementasi Kebijakan Dalam Perspektif Realitas, Cahaya Abadi, Tulung Agung Jawa Timur.
- Miftah, Thoha. 2008. Perilaku Organisasi; konsep dasar dan aplikasinya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mutiasari, M., Yamin, M. N., & Alam, S. (2016). Implementasi Kebijakan Perizinan Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resort (POLRES) Kota Kendari. Publica (Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik), 1(1). Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif
- Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia
- Nawawi, H. Hadari. 1983. Metode Penelitian Deskriptif. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Pengertian *policy* atau kebijakan, Donovan dan Jackson dalam *keban* (2004: 55)
- R. Dye Thomas 1992, Understanding Public Policy (New Jersey: Englewood Cliffs)
- Rosenbloom, David H. and Robert S. Kravchuk, public administration Understanding Management, Politics, and Law In the Public Sector, 6th Edition, New York: McGraw-Hill, 2005.
- Suharto, Edi. membangun masyarakat memberdayakan rakyat, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sugiyono. 2003. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Winarno. 2004. Teori dan Proses Kebijakan Publik.

Media Pressindo: Yogyakarta Daerah.
(Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional di Ruang Seminar Penida Noor Fia UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 14-18 Juli 2003)

Winarno, Budi. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002

Pedoman Umum

Pedoman Umum Program Keluarga Harapan 2008

Pedoman Umum Program Keluarga Harapan 2009

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Jurnal Penelitian

Rosalina Y. Shella (2018) Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Tandigoa Yulius (2016) Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sesena Padang Kabupaten Mamasa

Akmala F. Cita (2017) Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan Kabupaten Temanggung

Aini Nurul (2018) Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

Martilova Monica (2019) Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara